

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI
KOTA JAKARTA TAHUN 2022 – 2024**



Muhammad Andika

1181004079

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
STUDI KEBIJAKAN PUBLIK
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS BAKRIE
2025**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Muhammad Andika

Nim 1181004079

Tanggal : 26 Maret 2025

Jakarta, 26 Maret 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Andika', with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Andika

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh:

Nama : Muhammad Andika
Nim : 1181004079
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital di Kota
Jakarta Tahun 2022 - 2024
Tanggal : 26 Maret 2025

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pembahas dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Program studi Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Bakrie.

Dewan Penguji

Pembimbing : Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A.

Penguji I : Dr.Rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt.

Penguji 2 : Insan Harapan Harahap, S.sos., M.AP

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Bakrie, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Andika
Nim 1181004079
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jenis tugas akhir : Penelitian Kualitatif, Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bakrie Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non – Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di kota Jakarta Tahun 2022 – 2024”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini, Universitas Bakrie Berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta untuk kepentingan Akademik. Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta Pusat

Pada tanggal : 26 Maret 2025

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Andika', with a long horizontal stroke extending to the right.

Muhammad Andika

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana telah memberikan rahmat, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di kota Jakarta Tahun 2022 – 2024”. Penulisan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa ada bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, Penulis menyampaikan ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan kemudahan dalam setiap langkah penulis
2. Prof. Ir. Sofia W. Alisjahbana, M.Sc., Ph.D., IPU., ASEAN Eng. Selaku Rektor Universitas Bakrie
3. Prof. Dr. Dudi Rudianto, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie.
4. Dr.rer.pol. Aditya Batara Gunawan, S.Sos, M.Litt. Selaku Ketua program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie
5. Dr. Muhammad Badaruddin, S.Sos., M.Sc., M.A. Selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah berkenan memberikan waktu luang untuk memberikan petunjuk, arahan, serta bimbingan dalam penulisan tugas akhir ini hingga terselesaikan
6. Insan Harapan Harahap, S.Sos., M.AP. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis di universitas Bakrie
7. Erikson P. Manihuruk, S.Kom, M.Si. Selaku kepala Bagian Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah membantu dan memberikan data yang berhubungan dengan tugas akhir ini
8. Prima Pramudya selaku Pegawai Dinas Dukcapil Jakarta Barat telah membantu dan memberikan data yang berhubungan dengan tugas akhir ini.
9. Pihak – Pihak di Dinas yang terkait dengan Data yang diberikan untuk penulis serta dukungan dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Kedua Orangtua Tercinta yang senantiasa mendoakan, Memberikan dukungan baik secara moral dan materi dan mendampingi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Claudia Nur Firli selaku kekasih yang telah memberikan dukungan, dan bantuan guna menyemangati penulis untuk menyelesaikan tugas akhir

12. Irfan Zacky S.Psi. selaku sahabat yang telah membantu dukungan materil guna menyelesaikan tugas akhir ini
13. Muhammad Farhan S.I.P. selaku sahabat yang telah membantu dukungan materil dan moral guna menyelesaikan tugas akhir ini
14. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Jakarta, Maret 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Jakarta pada tahun 2022-2024. Dalam era digital yang berkembang pesat, teknologi telah mengubah cara pemerintah memberikan layanan publik. Program IKD ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan. Namun, meskipun kebijakan ini menawarkan banyak manfaat, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesenjangan data antar instansi masih menjadi hambatan utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan analisis dokumentasi. Fokus utama penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas layanan administrasi, tantangan yang muncul selama implementasi, dan rekomendasi untuk perbaikan. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan, termasuk komunikasi antar instansi, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan IKD memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, implementasinya masih terkendala oleh berbagai masalah, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, masalah akses teknologi di daerah-daerah tertentu, dan masalah koordinasi antar lembaga pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan komunikasi, penyempurnaan infrastruktur digital, dan peningkatan kemampuan pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk memastikan kesuksesan kebijakan IKD di masa depan.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Layanan Publik, Implementasi Kebijakan, Infrastruktur Digital, Koordinasi Antar Instansi.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Digital Population Identity (IKD) policy in Jakarta from 2022 to 2024. In the rapidly advancing digital era, technology has transformed the way the government provides public services. The IKD program is expected to improve the efficiency, accuracy, and accessibility of population administration services. However, despite the numerous benefits the policy offers, challenges such as limited digital infrastructure, low digital literacy among the public, and data discrepancies between agencies remain significant barriers. This research adopts a qualitative approach, gathering data through interviews and document analysis. The primary focus of the study is to identify the extent to which this policy can enhance the quality of administrative services, the challenges encountered during its implementation, and recommendations for improvement. The study also examines factors influencing the policy's success, including inter-agency communication, resource availability, implementer disposition, and the existing bureaucratic structure. The results indicate that while the IKD policy has great potential to improve public service efficiency, its implementation faces several issues, such as insufficient public outreach, technology access challenges in certain areas, and coordination problems between government agencies. Therefore, improving communication, refining digital infrastructure, and enhancing the capabilities of policy implementers are crucial to ensuring the future success of the IKD policy.

Keywords: Digital Population Identity, Public Services, Policy Implementation, Digital Infrastructure, Inter-Agency Coordination.

Daftar Isi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	1
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	3
KATA PENGANTAR.....	4
ABSTRAK	6
DAFTAR ISI	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1.5.2 MANFAAT PRAKTIS.....	22
1.6 SISTEMATIKA PEMBAHASAN	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1 ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	25
2.2 KEBIJAKAN PUBLIK.....	25
2.3 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK	26
2.4 TRANSFORMASI DIGITAL	27
2.5 KONSEP PENELITIAN	28
2.6 BENTUK EMPIRIK DARI VARIABEL	29
2.7 ALUR BERPIKIR.....	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
3.1 METODE KUALITATIF	31
3.2 UNIT ANALISIS	31
3.3 JENIS DATA DAN SUMBER DATA	32
3.3.1 <i>Jenis Data</i>	32
3.3.2 <i>Sumber Data</i>	32
3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA	33
3.5 <i>Pengolahan data</i>	33
3.5.1 <i>Analisis data</i>	33
3.5.2 <i>Uji Validitas dan Reliabilitas</i>	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 PENDAHULUAN.....	37
4.1.1 <i>Hasil Observasi</i>	37
4.1.2 <i>Sejarah Awal Program Identitas Kependudukan Digital</i>	39
4.2 LATAR BELAKANG PENELITIAN	41
4.2.1 <i>Tahapan Implementasi Pertama</i>	42
4.2.2 <i>Tahapan Implementasi Kedua</i>	42
4.2.3 <i>Analisa Tahapan Implementasi</i>	45
4.3 KOORDINASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM IMPLEMENTASI IKD	47

4.3.1 Kementerian Dalam Negeri.....	47
4.3.2 PT Telkom dan Bappenas.....	48
4.3.3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.....	49
4.3.4 Kementerian Sosial	50
4.3.5 Ditjen Pajak	51
4.3.6 Kementerian Kesehatan.....	52
4.3.7 Komisi Pemberantasan Korupsi	55
4.3.7 Komisi Pemilihan Umum.....	57
4.3.8 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.....	59
4.3.9 Badan Penyelenggara Jaminan Nasional.....	61
4.4. MANFAAT DAN FUNGSI IKD	63
4.5 KEBERHASILAN IMPLEMENTASI	65
4.5.1 Dampak Negatif.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	67
5.1 KESIMPULAN	67
5.2 SARAN	69
5.2.1 Optimasi Digitalisasi.....	69
<i>Kebijakan Publik harus responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan adaptasi terhadap kebutuhan zaman. Digitalisasi merupakan kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Menurut buku Kebijakan Publik dengan konteks Kebijakan Identitas Digital, Optimasi mencakup</i>	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
<u>TABLE 1 JUMLAH PENDUDUK MENURUT BPS</u>	15
<u>TABLE 2 PENELITIAN TERDAHULU</u>	17
<u>TABLE 3 OPERATIONAL KONSEP</u>	35
<u>TABLE 4 TOTAL ANGGARAN</u>	38
<u>TABLE 5 HASIL IMPLEMENTASI</u>	43